



# RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT




# PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target indikator kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Dinas



JANTANI ALI, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP.19731022200501 1 007

# DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 ...	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	13
<b>BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>14</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	14
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>29</b>
4.1. Program dan Kegiatan.....	29
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>45</b>

# DAFTAR TABEL

---

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021 .....	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra	11
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Indikator Kinerja.....	15
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 ..	16
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan .....	30

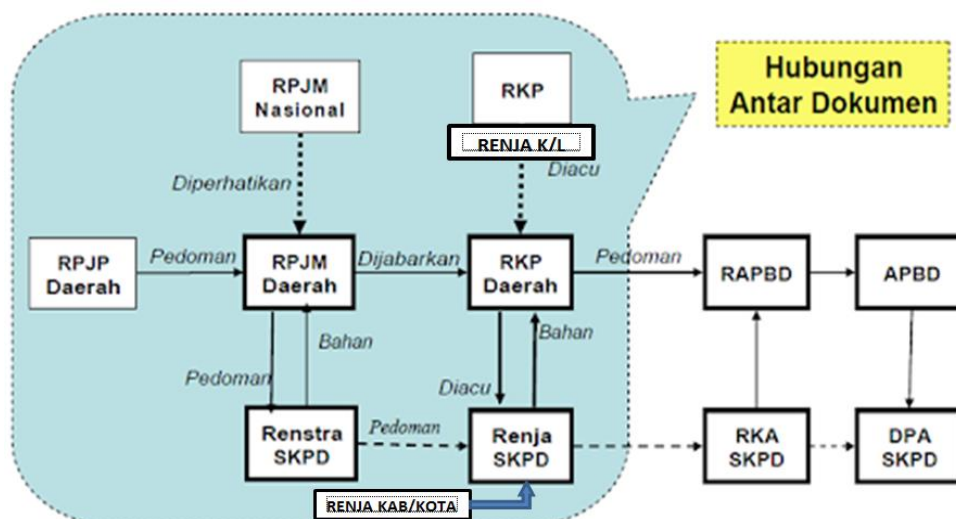
# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar I.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan: (1). persiapan penyusunan; (2). penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum /lintas bidang; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Perubahan Renja Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun kelima dari Renstra Tahun 2018-2023 sehingga prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Seri E Tahun 2020)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 73 Seri F).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah menjabarkan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2018–2023 yang mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang meliputi rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah :

- 1) Sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2023;
- 2) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk memahami arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dirumuskan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
- 3.2. Program dan Kegiatan
- 3.3. Program dan Kegiatan Perubahan

##### **BAB IV PENUTUP**

# B A B II

## EVALUASI RENCANA KERJA <sup>S/D</sup> TRIWULAN II

---

### 2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 Dinas PUPRPRKP melaksanakan 15 Program, 34 kegiatan dengan anggaran Rp 292.689.619.572,00. Pada bulan Juni 2023 dilakukan Penambahan anggaran untuk kegiatan G20 di Pangkalpinang yang anggaran Dinas PUPRPRKP sebanyak Rp 292.689.619.572,00 menjadi Rp 292.082.850.553,40. Hal tersebut berimplikasi terhadap capaian realisasi kinerja, fisik maupun keuangan program dan kegiatan Dinas PUPRPRKP.

Hingga Triwulan II tahun 2023, tingkat realisasi kinerja realisasi keuangan sebesar 26,72%. Berikut adalah table hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<b>Nilai SAKIP</b>	78	Rp 36.608.449.941,00		Rp 34.096.264.543,00		43,58%	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 624.119.862,00	6	Rp 215.436.982,00	64,29	34,52	
Administrasi Keuangan	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan		Rp 27.632.582.608,00	1.560	Rp 12.909.633.203,00	53,57	46,72	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan administrasi barang milik daerah		Rp 40.000.000,00	50	Rp 24.996.000,00	50	62,49	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	survey kepuasan pelayanan kepegawaian		Rp 438.579.351,00	343	Rp 231.870.400,00	95,28	52,87	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		Rp. 959.897.660,00	0	Rp 368.522.710,00	0	38,39	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 1.562.342.409,00	25	Rp 227.450.000,00	25	14,56	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 2.700.703.301,00	25	Rp 1.131.069.448,00	25	41,88	



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 2.650.224.750,00	25	Rp 128.549.557,00	25	4,85	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	5,56	Rp 47.718.101.313,00	0	Rp 8.175.908.622,00	0	17,13	
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	0,3	Rp 16.715.504.200,00	0	Rp 3.673.684.803,00	0	21,98	
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola	1250	Rp. 31.002.597.113,00	0	Rp. 4.502.223.819,00	0	14,52	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan	25	Rp 473.991.619,00	0	Rp 0	0	0	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang disusun	1	Rp. 473.991.619,00	0	Rp. 0	0	0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	15	Rp 249.998.500,00	0	Rp 0	0	0	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani oleh system Persampahan Regional (KK)	144	Rp 249.998.500,00	0	Rp 0	0	0	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan	27	Rp .854.343.719,00		Rp 2.854.343.719,00		8,09%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SISTEM AIR LIMBAH	pengembangan sistem air limbah yang disiapkan							
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disusun	1	Rp 2.854.343.719,00	-	Rp 151.896.950,00	-	31,98	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan	25	Rp 99.981.631,00	0	Rp 0,00	0	0	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disusun	1	Rp 99.981.631,00	0	Rp 0,00	0	0	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	47	Rp 8.725.350.348,00		Rp 3.780.350.348,00		13.12%	
Penetapan dan	Jumlah Bangunan Gedung	10	Rp 8.725.350.348,00	-	Rp 18.725.350.348,00	-	9.68 %	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Strategi Provinsi yang diselenggarakan							
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas kawasan yang tertata	7	Rp 1.556.619.288,00		Rp 28.528.237,00	0	1,83	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan yang ditata Bangunan dan Lingkungannya	4	Rp 1.556.619.288,00		Rp 28.528.237,00	0	1,83	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	100	Rp 6.254.819.099,00	0	Rp 49.478.506.780,00	0	29,76	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan</i>	100	Rp 166.254.819.099,00	0	Rp 49.478.506.780,00	0	29,76	



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<i>tanah untuk pembangunan (%)</i>							
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	100	Rp 800.998.300,00		Rp 247.667.475,00		30,92	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Luas Lahan ganti kerugian dan santuan tanah pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diselesaikan (Hektar)	15000	Rp 553.799.100,00	30	Rp 131.446.032,00	50	23,74	
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Luas Lahan ganti kerugian dan santuan tanah pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diselesaikan (Hektar)	15000	Rp 174.199.400,00	30	Rp 85.910.906,00	100	49,32	
Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Luas Lahan ganti kerugian dan santuan tanah pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diselesaikan (Hektar)	15000	Rp 72.999.800,00	0	Rp 30.310.537,00	-	41,52	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	100	Rp 1.803.624.000,00	0	Rp 349.700.150,00	0	<b>19,39</b>	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan (%)	100	Rp 1.054.834.800,00	0	Rp 229.065.604,00	0	21,72	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	100	Rp 33.999.700,00	0	Rp 6.970.000,00	0	<b>2,98</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	100	Rp 514.789.500,00	0	Rp 113.664.546,00	0	<b>22,08%</b>	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	7	Rp 718.298.000,00	0	Rp 14.070.240,00	0	<b>1,96</b>	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	<i>Persentase Kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)</i>	5	Rp 718.298.000,00	0	14.070.240,00	0	<b>1,96</b>	
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan (%)	23	Rp 9.106.197.700,00	0	Rp .208.922.030,00	0	2,29	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dilaksanakan (%)	2	Rp 550.000.000,00	0	Rp 28.922.030,00	-	5,26	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Nilai kekumuhan	1	Rp 8.556.197.700,00	0	Rp 179.204.133,00	-	2,09	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<b>Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU</b>	100	Rp 3.885.909.734,00	0	Rp 696.866.106,00	0	17,93	
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	<b>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman</b>	100	Rp 3.885.909.734,00	0	Rp 693.684.946,00	0	17,93	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<b>PRESENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	27	Rp 151.994.200,00		Rp 151.994.200,00	-	0.31%	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<b>Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	2	Rp 151.994.200,00		Rp 151.994.200,00	-	0.31%	



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	<b>PRESENTASE PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	27	Rp 69.991.300,00	0	Rp 4.530.000,00	0	6,47	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	1	Rp 69.991.300,00	0	Rp 4.530.000,00	0	6,47	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	27	Rp 54.271.500,00	0	Rp 12.003.800,00	0	22,12	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	1	Rp 54.271.500,00	0	Rp 12.003.800,00	0	22,12	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	100	Rp 54.271.500,00		Rp 54.271.500,00			
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	100	Rp 54.271.500,00		Rp 54.271.500,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD</b>	80	Rp .556.679.380,00		Rp .977.383.010,00			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	80	Rp 314.994.600,00	50	Rp 43.702.778,00	50	13,87	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	80	Rp 470.125.700,00	12,50	Rp 206.785.000,00	12,50	43,99	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	80	Rp 529.550.780,00	33,33	Rp 185.794.351,00	33,33	35,09	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggran RKPD yang di Evaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT)	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	80	Rp 242.008.300,00	16,67	Rp 52.409.376,00	16,67	21,66	

AI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

# B A B III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

### 3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas

Tujuan rencana kerja tahun 2023 adalah “**Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum**” dan sasaran rencana kerja adalah “**Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur**” Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

**Tabel 3.1. Tujuan, sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur		Rasio Ketersediaan Infrastruktur	100%
		Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur	0,81

### 3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 18 (delapan belas) program, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan dengan lokasi tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 3.3. Program dan Kegiatan Perubahan

Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan pagu anggaran dan pengurangan pagu anggaran meliputi 18 (delapan belas) program, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan. Adapun rencana kerja perubahan tahun anggaran 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.2  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA DINAS TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1					URUSAN													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										277,146,277,758	402,046,277,758		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										36,608,449,941	35,196,264,543		
1	03	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										624,119,862	624,119,862		
1	03	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen			387,168,500	387,168,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20 Laporan	20 Laporan			236,951,362	236,951,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										27,632,582,608	24,311,334,710		
1	03	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					195 Orang/ Bulan	192 Orang/ Bulan			27,582,583,408	24,261,335,510	
1	03	01	1.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen			49,999,200	49,999,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	03	01	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										40,000,000	100,000,000		
1	03	01	1.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	1 Laporan			40,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										438,579,351	438,579,351		
1	03	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					360 Paket	360 Paket			358,579,351	358,579,351	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang	0 Orang			80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										959,897,660	1,109,897,660		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket			99,811,260	99,811,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket			99,998,800	99,998,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket			69,999,300	69,999,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket			31,875,400	31,875,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket			49,999,900	49,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen			24,300,000	24,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan			129,913,000	129,913,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	03	01	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan			454,000,000	604,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	03	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										1,562,342,409	2,102,404,909		
1	03	01	1.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Dokumen 0 Unit	0 Dokumen 45 Unit			366,342,409	506,404,909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 7	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	1 Unit			1,196,000,000	1,596,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,700,703,301	2,700,703,301		
1	03	01	1.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0 Laporan			84,606,400	84,606,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			391,796,901	391,796,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun					0 Laporan 0 Dokumen	0 Laporan 0 Dokumen			2,224,300,000	2,224,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,650,224,750	3,809,224,750	
1	03	01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	17 Unit			322,915,000	372,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	
1	03	01	1.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	10 Unit			163,977,000	297,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	
1	03	01	1.0 9	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit			1,000,000,000	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	
1	03	01	1.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	3 Unit			1,163,332,750	2,138,332,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										47,718,101,313	43,691,959,836	
1	03	02	1.0 1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota										16,715,504,200	17,662,085,883	
1	03	02	1.0 1	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	1 Dokumen			0	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	
1	03	02	1.0 1	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			11,717,105,700	12,378,687,383	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	03	02	1.0	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		Kab. Belitung, Membalong, Mentigi Kab. BelitungTimur, Manggar, Kurnia Jaya Kab. BelitungTimur, Manggar, Baru Kab. BelitungTimur, Manggar, Mekar Jaya Kab. BelitungTimur, KelapaKampit, Mayang			0.9 KM	0.01 KM			0	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	03	02	1.0	65	Operasi dan PemeliharaanSungai		Panjang Sungai yang Dipelihara		Kab. Bangka,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota PangkalPinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. BangkaSelatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. BangkaTengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan Kab. BelitungTimur, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan			11 KM	11 KM			4,998,398,500	4,998,398,500	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)
1	03	02	1.0	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											31,002,597,113	26,029,873,953	
1	03	02	1.0	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		Kab. Bangka,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. BangkaSelatan, Payung, Jelutung II			1 Dokumen	4 Dokumen			978,220,000	1,338,220,000	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)
1	03	02	1.0	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		Kab. BangkaSelatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Kelapa,Kelapa			4 KM	4 KM			5,303,933,776	5,303,933,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik

1	03	02	1.0 2	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan		Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang			10 KM	10 KM			23,026,508,617	17,693,785,457	DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik
1	03	02	1.0 2	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		Kab. Bangka, Merawang, Kimak			2300 m	2300 m			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik
1	03	02	1.0 2	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan danDipelihara		Kab. Bangka, Merawang, Kimak Kab. Bangka Selatan, Toboali, Kepoh Kab. Bangka Barat, Kelapa,Beruas			5.5 KM	5.5 KM			997,536,620	997,536,620	DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik
1	03	02	1.0 2	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang			10 KM	10 KM			349,960,900	349,960,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi KhususFisik
1	03	02	1.0 2	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi		Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			346,437,200	346,437,200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>											<b>249,998,500</b>	<b>0</b>	
1	03	03	1.0 1		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>											<b>249,998,500</b>	<b>0</b>	
1	03	03	1.0 1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis SPAM		Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Dokumen	0 Dokumen			249,998,500		0DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	03	1.0 1	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi/peningkatan/Pembangunan/p erluasan/optimalisasi SPAM Regional		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang,Semua Kelurahan, Kab. BangkaBarat, Mentok, Semua Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen			0		0DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	03	1.0 1	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan		Kapasitas Peningkatan SPAM Regional		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan Kota PangkalPinang, Gabek, Semua Kelurahan Kab. BangkaBarat, Mentok, Semua Kelurahan			10 Liter/Detik	10 Liter/Detik			0		0DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1	03	03	1.0	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM		Kab. BelitungTimur, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan				1 Kab/Kota	1 Kab/Kota			0		DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												473,991,619	378,221,620	
1	03	04	1.0	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional												473,991,619	378,221,620	
1	03	04	1.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			423,999,919	329,999,920	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	04	1.0	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Kab. BangkaSelatan, Simpang Rimba, Rajik				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat			49,991,700	48,221,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												2,854,343,719	2,962,023,719	
1	03	05	1.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional												2,854,343,719	2,962,023,719	
1	03	05	1.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis SistemPengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestikyang Tersusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			399,999,019	399,999,019	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	05	1.0	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk		Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				140 Unit	105 Unit			2,379,365,500	2,468,365,500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	05	1.0	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit  Kota Pangkal Pinang, Rangkui, ParitLalang				2 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat			74,979,200	93,659,200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												99,981,631	99,981,631	
1	03	06	1.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi												99,981,631	99,981,631	
1	03	06	1.0	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			99,981,631	99,981,631	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												18,725,350,348	22,285,350,348	
1	03	08	1.0	1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi												18,725,350,348	22,285,350,348	



1		03	08	1.0 1	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	19 Dokumen			17,487,671,648	20,957,671,648	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03	08	1.0 1	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03	08	1.0 1	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota			1 Unit	1 Unit			973,556,400	993,556,400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03	08	1.0 1	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Dokumen	1 Dokumen			93,974,100	163,974,100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03	08	1.0 1	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			93,884,200	93,884,200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03	08	1.0 1	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi					0 Dokumen	0 Dokumen			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1		03		1.0 1	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara		Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit			35,385,800	35,385,800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1	03	08	1.0 1	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			40,878,200	40,878,200	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>											<b>1,556,619,288</b>	<b>3,251,382,655</b>	
1	03	09	1.0 1		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>1,556,619,288</b>	<b>3,251,382,655</b>	
1	03	09	1.0 1	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategidan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan StrategisDaerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan StrategisDaerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Dokumen	2 Dokumen			105,470,305	65,470,305	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	09	1.0 1	02	Supervisi Penataan/Pemeli haraan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Supervisi Penataan/Pemeli haraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Buddaya Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,Kawas an Sistem Perkotaan Nasional dan Kawa Strategis Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Kawasan	6 Kawasan			31,428,572	31,428,572	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	09	1.0 1	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan StrategisLainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Kawasan	1 Kawasan			986,810,111	2,666,573,478	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	09	1.0 1	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan StrategisLainnya		Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			1 Kawasan	1 Kawasan			199,997,900	204,997,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota		Jumlah Dokumen Pembinaan TeknisPenataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			179,994,700	229,994,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/PemeliharaanBangunan dan Lingkungan	raan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen			52,917,700	52,917,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												166,254,819,099	290,922,271,106	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi												166,254,819,099	290,922,271,106	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah DokumenHasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah DokumenHasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Jalan) Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Jembatan)						0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen			200,289,092	709,919,892	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan						0 M²	0 M²			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan LegerJalan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan						1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

[illegible]

1	03	11	1.0 3	02	Usaha, Tertib Pengelenggaraan ,dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi pada APBD Provinsi		Usaha, Tertib Penyelenggaraan ,dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi pada APBD Provinsi						2 Laporan	2 Laporan			72,999,800	72,999,800	
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>												<b>1,803,624,000</b>	<b>1,957,824,000</b>	
1	03	12	1.0 1		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>												<b>1,054,834,800</b>	<b>1,149,034,800</b>	
1	03	12	1.0 1	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasidan Penetapan RTRW Provinsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi						1 Dokumen	1 Dokumen			1,054,834,800	1,149,034,800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	12	1.0 2		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>												<b>233,999,700</b>	<b>233,999,700</b>	
1	03	12	1.0 2	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW danRRTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen			233,999,700	233,999,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	12	1.0 4		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>												<b>514,789,500</b>	<b>574,789,500</b>	
1	03	12	1.0 4	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan HukumBidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						1 Dokumen	1 Dokumen			257,899,900	297,899,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	12	1.0 4	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						1 Dokumen	1 Dokumen			256,889,600	276,889,600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>												<b>13,710,405,434</b>	<b>13,810,405,434</b>	
1	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>												<b>718,298,000</b>	<b>460,798,700</b>	
1	04	02	1.0 1		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>												<b>718,298,000</b>	<b>460,798,700</b>	
1	04	02	1.0 1	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			68,999,800	68,999,800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	02	1.0 1	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			252,199,500	252,199,500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	02	1.0 1	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat		Jumlah Dokumen Data Rumah yangTerkena Bencana Berdasarkan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	0 Dokumen			174,499,500	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

						Bencana		Tingkat Kerusakan Rumah											
1	04	02	1.01	05		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	0 Dokumen			82,999,800	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	02	1.01	06		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			139,599,400	139,599,400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											9,106,197,700	9,303,697,000		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											550,000,000	687,499,300		
1	04	03	1.01	08		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			456,000,000	493,499,300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	03	1.01	09		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			94,000,000	194,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											8,556,197,700	8,616,197,700		
1	04	03	1.02	01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	03	1.02	03		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		Kab. Bangka, Belinyu, Mantung Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang Kota Pangkal Pinang, Rangkui,			93 UnitRumah	93 UnitRumah			6,972,400,000	7,032,400,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

								Keramat Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali  Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang									
1	04	03	1.0 2	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengandi Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah15 (Lima Belas) Ha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			100,000,000	100,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	03	1.0 2	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengandi Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Luas Permukiman Kumuh Dengan Lua10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dip ug	Kab. Bangka, Belinyu, Mantung  Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga  Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali  Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis  Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang  Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung			15 Ha	15 Ha			1,483,797,700	1,483,797,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										3,885,909,734	4,045,909,734	
1	04	05	1.0 1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman										3,885,909,734	4,045,909,734	



[illegible]

2	10	05	1.01	02	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		santunan tanah untuk pembangunan						1 Laporan	1 Laporan			51,997,000	51,997,000	
TOTAL																	291,132,940,192	416,132,940,192	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												1,556,679,380	1,556,679,380	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												1,556,679,380	1,556,679,380	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												314,994,600	314,994,600	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,556,679,380	1,556,679,380	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor UPTD						0 Paket 100 %	0 Paket 100 %			24,994,900	24,994,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD						0 Paket 100 %	0 Paket 100 %			49,999,700	49,999,700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan UPTD						0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %			100,000,000	100,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD						0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %			140,000,000	140,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												470,125,700	470,125,700	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebel yang Disediakan						8 jenis	8 jenis			169,855,100	169,855,100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												300,270,600	300,270,600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												529,550,780	529,550,780	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (UPTD)						100 %	100 %			2,610,000	2,610,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)						100 %	100 %			149,940,780	149,940,780	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (UPTD)						100 %	100 %			377,000,000	377,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												242,008,300	242,008,300	

1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (UPTD)					100 %	100 %			162,012,000	162,012,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara UPTD					100 %	100 %			29,996,300	29,996,300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD)					100 %	100 %			50,000,000	50,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TOTAL																1,556,679,380	1,556,679,380	
TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN																292,689,619,572	417,689,619,572	

# B A B IV

## PENUTUP

---

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2027, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.